BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 01 TAHUN 2016

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Penjabat Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 095 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan
   a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 32.898.491.586,26
   b. Dana Perimbangan Rp. 662.350.632.000,00
   c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 163.387.857.120,00

   Jumlah Pendapatan Rp. 858.636.980.706,26

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 145.812.845.042,00	
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00	
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,00	
4) Belanja Hibah	Rp. 4.950.000.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 845.000.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 67.429.942.000,00	
8) Belanja Tak Terduga	Rp. 1.000.000.000,00	
		Rp. 220.037.787.042,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 9.519.563.664,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 230.145.049.197,00	
3) Belanja Modal	Rp. 399.007.902.536,50	
		Rp. 638.672.515.397,00
Jumlah Belanja		Rp. 858.710.302.439,00
Surplus/(Defisit)		Rp. (73.321.733,24)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 73.321.733,24	
b. Pengeluaran	Rp. 0,00	
Jumlah Biaya Neto		Rp. 73.321.733,24
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mula! berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 11 Januari 2016

PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

H. APRIYADI

Lampiran I Penjabaran APBD
Nomor : 001/2016
Tanggal : 11 Januari 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	858.636.980.706,26
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	32.898.491.586,26
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	15.132.670.673,26
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.699.940.176,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.065.880.737,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	662.350.632.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	244.447.302.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	319.054.010.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	98.849.320.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	163.387.857.120,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.893.810.290,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.204.160.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	52.446.995.250,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	60.842.891.580,00
2	**BELANJA**	858.710.302.439,50
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	220.037.787.042,00
2.1.1	Belanja Pegawai	145.812.845.042,00
2.1.4	Belanja Hibah	4.950.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	845.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	67.429.942.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	638.672.515.397,50
2.2.1	Belanja Pegawai	9.519.563.664,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.145.049.197,00
2.2.3	Belanja Modal	399.007.902.536,50
	SURPLUS / (DEFISIT)	(73.321.733,24)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	73.321.733,24
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.321.733,24
	PEMBIAYAAN NETTO	73.321.733,24
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Talang Ubi, 11 Januari 2016

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

H. APRIYADI

Printed By SimDa